

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali fenomena ataupun kejadian yang terjadi seiring juga dengan berkembangnya sektor publik yang semakin melesat dengan cepat di Indonesia, apalagi ditambah dengan semakin besarnya tuntutan terhadap akuntabilitas instansi-instansi pemerintah yang masih dalam masa pengembangan atau yang sudah berjalan dengan lancar yang tersebar di Indonesia. Dalam kawasan lingkup organisasi pemerintahan, akuntabilitas suatu instansi sektor publik itu dijadikan sebagai sumber-sumber informasi dari berbagai aktivitas atau kinerja para pemerintah dalam bidang finansial yang berguna untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Akuntabilitasnya suatu organisasi juga dapat mencerminkan bagaimana sebenarnya keadaan organisasi tersebut.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik itu sendiri dapat kita artikan sebagai kewajiban-kewajiban para pemegang amanah atau yang sering disebut dengan agen, guna untuk memberikan sajian, melaporkan, mengemukakan segala aktivitas-aktivitas, serta mampu untuk mempertanggungjawabkannya kepada para pihak yang memberikan amanah atau yang sering disebut dengan principal, dimana mereka memiliki hak serta wewenang masing-masing untuk menagih pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika dalam proses melaksanakan misi-misi atau target organisasi didalam mencapai tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah dibahas lalu ditentukan, melewati satu atau beberapa media pelaksanaan tanggung jawab yang akan dilaksanakan secara berurutan, menurut Standbury (2003) dalam Mardiasmo (2006).

Kata akuntabilitas itu sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *accountability* yang mempunyai makna situasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada umumnya, akuntabilitas itu adalah sebuah ungkapan atas kegiatan atau kinerja finansial oleh instansi pemerintah daerah untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus bisa menjadi subyek yang memberikan informasi untuk memenuhi hak masyarakat baik itu hak untuk mengetahui, hak untuk mendapat informasi ataupun hak untuk didengarkan aspirasinya.

Publik sebagai penerima pelayanan memiliki hak untuk mengetahui apakah setiap anggaran yang merupakan “titipan rakyat” digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau program-program pembangunan untuk kelangsungan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah daerah sebagai instansi kepercayaan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan tanggung jawab penggunaan anggaran atas hasil (*outcome*) serta sejauh mana capaian-capaian kinerja yang dihasilkan kepada publik. Terwujudnya kewajiban instansi pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya demi kesuksesan ataupun kegagalan penerapan kinerja guna meraih tujuan dan sasaran yang didambakan harus disajikan dalam laporan kinerja dari pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan demi terciptanya kinerja pada instansi pemerintah, dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif serta efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem tersebut disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem tersebut melekat pada sepanjang kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah. Yang mana akan adanya capaian kinerja yang baik akan terwujud dengan kegiatan yang terstruktur yang mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang teratur. Sistem pengendalian intern pemerintah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri yang menyatakan bahwa:

Sistem pengendalian intern adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai.

Terkait kajian mengenai kinerja, Sedarmayanti dalam Hakim (2016) mengartikan kinerja sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh individu maupun suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil dari suatu kegiatan yang membentuk kinerja harus dapat dibuktikan secara konkrit dan dapat diukur

maupun dibandingkan dengan standar yang telah diberlakukan. Untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula. Kinerja yang dicapai oleh pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, atau bisa juga kinerja organisasi sangat membutuhkan kontribusi kinerja dari pegawai (Gibson, *et al* dalam Abdulah 2011). Hal tersebut mengartikan bahwa peran perilaku anggota instansi pemerintahan mampu memberikan pengaruh atas kinerja instansi pemerintah itu pula. Keberhasilan capaian kinerja yang maksimal, sesuai dengan harapan publik luas tentu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Melainkan memerlukan kerja keras dan dorongan individu untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu kualitas sumber daya manusia yang ada pada instansi pemerintah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pemerintahan yang lebih berdaya guna, mengeluarkan output yang bagus, bersih, dan juga bertanggungjawab guna untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, dan dalam proses perwujudan *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi dari masyarakat.

Akuntabilitas itu merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau tindakannya. Terkait dengan itu, kinerja itu sendiri adalah tingkat tahapan pelaksanaan atau kegiatan yang ingin dicapai dalam proses mewujudkan tujuan organisasi. Maka dari itu. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebuah tolak ukur dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan oleh instansi pemerintah.

Tentang tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berarti instansi pemerintah sama saja harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dimana tuntutan masyarakat itu harus bisa terlaksana dan disampaikan kembali dengan akuntabel dan transparan. Berarti instansi pemerintah harus mempunyai sifat yang amanah dimana itu juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adalah menyampaikan amanat dan menetapkan suatu perkara di antara manusia dengan cara yang Adil. Terkhusus untuk ayat ini biasanya banyak dikaitkan pada masalah pemerintahan ataupun masalah Negara. Orang yang sudah diberikan amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya dan dapat mempertanggungjawabkannya. Jika bukan pada ahlinya kekuasaan yang dikelola tersebut akan mengalami kehancuran. Sikap adil dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan bertanggungjawab dan jujur terhadap tugas masing masing. Jika keadilan dilanggar akan terjadi ketidakseimbangan

dalam pergaulan hidup. Salah satu pihak diuntungkan, sementara ada pihak lain yang harus menanggung kesengsaraan.

Dilansir dari BORNEONEWS (17 Februari 2017), Muara Teweh – Jainal Abidin selaku Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Barito Utara menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masi berada di posisi dengan peringkat C. “Peringkat buruk itu terjadi karena inkonsistensi dari instansi-instansi pemerintah, banyak catatan dari BPKP, BPK, Inspektorat Provinsi dan Kemenpan terkait dengan inkonsistensi AKIP Kabupaten Barito Utara” ungkapnya, Borneonews – Jumat (17 Februari 2017).

(Sumber:(<http://www.borneonews.co.id/berita/52612-duh-lakip-barito-utara-masi-h-peringkat-c>).

Jainal Abidin (2017) selaku sekda Barito Utara berkata, kenapa disebut dengan inkonsisten, dikarena program yang sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu tidak seimbang dengan apa yang tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) instansi pemerintah. Maka dari itu, Jainal mengingatkan instansi pemerintah Kabupaten Barito Utara agar bisa menyeimbangkan DPA dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sehingga sesuai dengan RPJMD dan LAKIP kabupaten Barito Utara bisa menjadi lebih baik lagi. “Memang kita akui, tahun ini kita terkendala dengan anggaran apabila harus menyesuaikan program yang telah tertuang dalam RPJMD. Namun diharapkan instansi pemerintah dapat memaksimalkan anggaran yang ada,” harapnya.

Untuk mempertanggungjawabkan segala tugas ataupun fungsinya pada bidang perencanaan pembangunan dan statistik, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai produk dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara atas berdasarkan pada Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang menggambarkan tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun dan akan dipublikasikan secara sistematis dan melembaga. LAKIP mempunyai fungsi bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga bisa menjaga terpeliharanya kepercayaan dari masyarakat.

Pada intinya, instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Barito Utara itu sendiri belum bisa memaksimalkan kinerja mereka sebagai subyek yang memberikan pelayanan terhadap para masyarakat. Dikutip dari website resmi Barito Utara (<https://barutkab.bps.go.id/>) untuk beberapa tahun terakhir ini, tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Utara masih terbilang cukup tinggi, banyak orang yang masih kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya

dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan, dan itu menandakan bahwa instansi-instansi pemerintah belum bisa secara maksimal untuk menyediakan lahan pekerjaan untuk orang-orang yang masih belum mempunyai pekerjaan. Dengan demikian para pemerintah belum bisa mencapai akuntabilitas kinerja yang diinginkan masyarakat.

Variabel-variabel pada penelitian kali ini diambil berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu oleh Putri (2013) dan Chintya (2015) dimana penelitian-penelitian tersebut sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian ini. Tetapi penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana variabel independennya adalah Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, lalu menambahkan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen. Biasanya Sistem Pengendalian Internal di jadikan sebagai variabel independen, tetapi kali ini menjadikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel interveningnya. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mampu memediasi pengaruh antar variabel tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti memberikan judul penelitiannya, yaitu: **“PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING”**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penulis membatasi variabel yang diangkat ke dalam penelitiannya agar ketika proses berjalannya penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam serta bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu penelitian ini hanya berkaitan pada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Pada penjelasan yang telah dipaparkan di atas, sudah jelas apa saja yang akan dijadikan peneliti sebagai rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Ada empat bagian rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian serta latar belakangnya, yaitu:

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dapat memberikan pengaruh pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memberikan pengaruh pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah?
3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dapat memberikan pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memberikan pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
5. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memberikan pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

6. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mampu memediasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
7. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mampu memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan, kali ini peneliti membagi beberapa tujuan penelitian, di antaranya:

1. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dapat memberikan pengaruh pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
2. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memberikan pengaruh pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dapat memberikan pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memberikan pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memberikan pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mampu memediasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Untuk mendapatkan studi empiris apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mampu memediasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada juga manfaat penelitian kali ini yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat secara praktis.

Bagi para praktisi di instansi pemerintah, diharapkan penelitian kali ini dapat memberikan beberapa sumber pemikiran tentang seberapa pentingnya peran dari kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan melalui sistem pengendalian internal pemerintah yang baik. Agar para praktisi di instansi pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya manusia serta dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem pengendalian internal pemerintah untuk menghasilkan ke-akuntabilisan kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat secara teoritis.

Bagi para akademisi, diharapkan penelitian kali ini bisa menjadi bahan referensi yang baik dan jelas atau bahan untuk penelitian selanjutnya terutama

dalam bidang akuntansi sektor publik pada ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).